

Menerobos Badai Revolusi: Dinamika Pengangkatan Sampurno Kolopaking Menjadi Bupati Bekasi, 1951

Muhammad Mulky Al Hamein

Sejarah dan Perdaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: muhammadmulkyalhamein@gmail.com*

*Korespondensi



Received: 12-09-2025, Revised: 30-11-2025, Accepted: 30-11-2025, Published: 30-11-2025

Abstrak

Penelitian ini menelaah proses pengangkatan Sampurno Kolopaking sebagai Bupati Bekasi pada tahun 1951, sebuah episode penting dalam sejarah politik lokal yang kurang mendapat perhatian dalam historiografi Indonesia. Sampurno Kolopaking, sebelumnya menjabat Bupati Deli Serdang (1947–1951), ditunjuk untuk memimpin Bekasi di tengah transisi politik pasca-revolusi, ketika pemerintah pusat berupaya mengonsolidasikan kekuasaan administratif di daerah hasil reorganisasi teritorial. Pengangkatan ini tidak sekadar persoalan administratif, tetapi sarat dengan dimensi politik, terkait tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat, elite lokal, dan partai-partai nasional. Tujuan penelitian ini adalah menelaah latar belakang politik di balik penunjukan Sampurno Kolopaking dengan menekankan peran dominan Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan kepemimpinan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah politik lokal, dengan sumber primer berupa arsip surat kabar Belanda dan Hindia Belanda, dokumen resmi pemerintah, serta sumber sekunder dari literatur akademik terkait, sehingga memungkinkan analisis mendalam mengenai relasi antara kebijakan pusat dan respons masyarakat di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Sampurno Kolopaking merupakan strategi intervensi pemerintah pusat untuk memastikan loyalitas pejabat daerah, sementara aspirasi Dewan Pemerintahan Daerah (*Bestuurscollege van de kabupaten*) sering diabaikan. Intervensi partai politik nasional, terutama PNI dan Masyumi, turut memengaruhi proses seleksi. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas politik pasca-revolusi, di mana pemerintah pusat tetap dominan, namun fragmentasi politik nasional membatasi ruang bagi aktor lokal. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan historiografi mengenai Sampurno Kolopaking, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang hubungan pusat-daerah, peran partai politik, dan konsolidasi negara Indonesia pada periode awal kemerdekaan.

Kata Kunci: Bekasi; Bupati; Politik Pusat-Daerah; Sampurno Kolopaking

Abstract

This study examines the appointment of Sampurno Kolopaking as Regent of Bekasi in 1951, an important episode in local political history that has received limited attention in Indonesian historiography. Sampurno Kolopaking, previously Regent of Deli Serdang (1947–1951), was assigned to lead Bekasi during the post-revolutionary political transition, when the central government sought to consolidate administrative authority in newly reorganized territories. The appointment was not merely administrative but laden with political dimensions, involving competing interests of the central government, local elites, and national political parties. The study aims to investigate the political background behind Kolopaking's appointment, emphasizing the dominant role of the Ministry of Home Affairs

in determining local leadership. Using a local political history approach, it relies on primary sources including Dutch and Dutch East Indies newspaper archives, official government documents, and secondary academic literature. This method allows an in-depth analysis of the relationship between central policies and local responses. Findings indicate that Kolopaking's appointment represented a strategy by the central government to ensure the loyalty of regional officials, while the aspirations of the Regional Administrative Council (*Bestuurscollege van de kabupaten*) were often overlooked. Interventions by national political parties, especially PNI and Masyumi, also influenced the selection process. This dynamic reflects the complexity of post-revolutionary politics, where central authority remained dominant, yet national political fragmentation limited space for local actors. The study not only fills a historiographical gap regarding Sampurno Kolopaking but also enhances understanding of center-regional relations, political party roles, and the consolidation of the Indonesian state during the early post-independence period.

Keywords: Bekasi; Central-Local Politics; Regent; Sampurno Kolopaking



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Sejarah politik lokal pasca-revolusi Indonesia belum banyak mendapatkan perhatian yang memadai, terutama jika dibandingkan dengan studi mengenai perjuangan bersenjata rakyat di daerah. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji adalah Bekasi, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten yang salah satunya baru ditetapkan sebagai kabupaten Bekasi pada tahun 1950 setelah sebelumnya berada di bawah wilayah Kabupaten Jatinegara berupaya menata kembali struktur administrasi daerah dengan menunjuk figur-figur baru untuk menduduki jabatan strategis, termasuk posisi bupati (BPK RI, 1950). Salah satu tokoh yang muncul dalam penelitian ini adalah Sampurno Kolopaking, seorang birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Deli Serdang (1947–1951), dan kemudian diangkat sebagai Bupati Bekasi pada tahun 1951. Penunjukan Kolopaking ini bukan sekadar peristiwa administratif, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik antara pemerintah pusat dan aspirasi politik lokal (De Nieuwsgier, 1951b).

Kajian mengenai Bekasi dalam historis ini lebih banyak menekankan pada aspek perjuangan militer, sosial, dan peran tokoh agama dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Salah satu karya yang cukup representatif adalah “Ulama Pejuang Kabupaten Bekasi” yang ditulis oleh Bahar Maksu et al., (2017). Buku ini berfokus pada kontribusi para ulama Bekasi dalam perjuangan melawan kolonialisme, terutama pada periode revolusi fisik 1945–1949. Melalui narasi biografis, para ulama digambarkan sebagai motor penggerak perlawanan sekaligus figur panutan yang mampu mengonsolidasikan kekuatan rakyat dalam menghadapi ancaman militer Belanda. Namun, penekanan yang kuat pada aspek militansi dan religiusitas membuat buku ini cenderung mengabaikan dimensi politik-administratif yang berkembang di Bekasi setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949. Dengan kata lain, meskipun karya ini penting dalam menunjukkan kedudukan ulama dalam sejarah lokal, ia belum memberikan perhatian yang memadai pada

proses pembentukan struktur pemerintahan daerah dan figur-figur birokrat yang muncul dalam periode awal 1950-an. Penyebutan Sampurno Kolopaking dalam buku tersebut tidak ada sama sekali, karena memang pembahasannya hanya fokus pada perjuangan ulama Bekasi dalam mempertahankan tanah air dari penjajah (Maksum et al., 2017).

Sumber lain yang banyak dirujuk adalah *Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru* yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi bekerja sama dengan Yayasan Historia Vitae Magistra (Yavitra) pada tahun 1992. Buku ini menyajikan gambaran panjang sejarah Bekasi mulai dari masa kerajaan Tarumanegara hingga awal Orde Baru. Di dalamnya, perhatian lebih banyak diberikan pada perkembangan sosial-ekonomi, perjuangan militer melawan kolonialisme, serta proses pembangunan daerah setelah kemerdekaan. Meski demikian, pembahasan mengenai masa transisi pasca-revolusi, khususnya dekade 1950-an, tidak terlalu mendalam (Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi, 1992). Figur Sampurno Kolopaking, misalnya, hanya disebut secara sekilas dalam konteks pengangkatan dirinya sebagai Bupati Bekasi, tanpa analisis yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik yang melatarbelakanginya. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber lokal cenderung menekankan narasi heroisme rakyat dan perkembangan pembangunan jangka panjang, tetapi mengesampingkan dinamika politik administratif yang sesungguhnya menentukan arah pemerintahan daerah pada masa-masa awal kemerdekaan.

Di tingkat nasional, sejumlah karya penting telah membahas konteks revolusi dan konsolidasi kekuasaan. Anthony Reid dalam *The Indonesian National Revolution* menggambarkan bagaimana pemerintah pusat berusaha memperkuat kendali politik setelah perang kemerdekaan, termasuk melalui pembentukan administrasi daerah yang baru dan penunjukan pejabat loyal di wilayah strategis. Reid menekankan bahwa proses konsolidasi ini tidak selalu mulus, karena seringkali menghadapi resistensi dari elite lokal maupun kelompok milisi yang mempertahankan pengaruhnya. Analisis Reid memberikan kerangka teoretis yang berguna untuk memahami bagaimana kebijakan pusat diterapkan di tingkat lokal, serta konflik dan kompromi yang muncul antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal (Reid, 1974). Robert Cribb dalam *Gangsters and Revolutionaries* menyoroti dinamika politik dan kekerasan di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Bekasi, yang menjadi salah satu wilayah penting pada masa revolusi. Cribb (2009) menjelaskan bagaimana berbagai kelompok milisi rakyat, tentara irregular, dan elite lokal saling berinteraksi, sering kali menimbulkan konflik, tetapi juga membentuk pola penguasaan wilayah yang kompleks. Ia menekankan bahwa kota-kota dan kabupaten di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, tidak hanya menjadi arena pertempuran fisik, tetapi juga lokasi negosiasi politik antara pemerintah pusat dan aktor lokal.

Dalam buku *Sejarah Bekasi: Sejak Peradaban Buni ampe Wayah Gini*, (Kusnawan, 2016) menyebut bahwa Sampurno Kolopaking resmi diangkat sebagai Bupati Bekasi pada 1 November 1951 dan dilantik pada 19 November 1951 di kantor Bupati Bekasi di Jatinegara. Namun, buku tersebut hanya menyinggung secara singkat mengenai pengangkatan Kolopaking tanpa membahas secara rinci dinamika politik, intervensi partai, maupun konflik dengan aktor lokal yang menyertai proses tersebut. Selain itu, buku tersebut tidak menjelaskan secara detail

perjalanan karier Kolopaking sebelumnya sebagai Bupati Deli Serdang hingga kemudian menjadi Bupati Bekasi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam untuk memahami konteks politik lokal, jalur karier pejabat, dan interaksi antara pemerintah pusat serta aktor lokal pada masa awal Republik Indonesia.

Dari tinjauan literatur di atas, terlihat bahwa historiografi Bekasi selama ini lebih menekankan pada aspek perjuangan militer dan peran tokoh-tokoh lokal dalam konteks revolusi. Sementara itu, kajian mengenai politik administratif dan figur birokrat lokal, khususnya pengangkatan Bupati Bekasi pada awal 1950-an, hampir tidak ditemukan dalam literatur yang ada. Di tingkat nasional, meskipun sejumlah karya membahas konsolidasi kekuasaan pasca-revolusi, mereka jarang menyoroti bagaimana kebijakan pusat diwujudkan melalui penunjukan pejabat daerah di wilayah seperti Bekasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait pengaruh politik pusat terhadap dinamika pemerintahan lokal.

Padahal, menurut Priyadi (2012) sumbangan sejarah lokal terhadap Sejarah Nasional Indonesia (SNI) menghadirkan tantangan metodologis tersendiri. Para sejarawan mencatat bahwa upaya menjadikan sejarah lokal sebagai bagian dari SNI sering “memancing kesulitan metodologis, menuntut perumusan permasalahan yang berbeda-beda, serta skala kepentingan peristiwa yang tidak sama.” Jika dipaksakan sebagai bahan penyusun SNI, sejarah lokal justru berpotensi melahirkan “SNI versi lokal”, yakni narasi daerah yang kesulitan menghubungkan peristiwa lokal dengan konteks nasional secara proporsional.

Dalam menganalisis pengangkatan Sampurno Kolopaking sebagai Bupati Bekasi pada tahun 1951, penelitian ini menggunakan perspektif Administrasi Publik, khususnya teori mengenai hubungan pusat-daerah, birokrasi pemerintahan, dan kontrol administratif negara. Dalam kerangka administrasi publik Indonesia, pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis dalam menata struktur pemerintahan daerah melalui penunjukan pejabat yang dianggap mampu mendukung agenda konsolidasi negara (Dwiyanto, 2022). Penunjukan kepala daerah pada masa awal 1950-an bukan hanya bersifat teknokratis, tetapi juga merupakan instrumen politik untuk memastikan stabilitas dan keselarasan antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Melalui perspektif ini, pengangkatan Kolopaking dipahami sebagai bagian dari mekanisme administratif negara dalam membangun birokrasi yang terintegrasi, sekaligus menunjukkan bagaimana pemerintah pusat menggunakan struktur birokrasi untuk mengendalikan dinamika politik lokal pada masa pasca-revolusi.

Penelitian ini bertujuan menelaah proses pengangkatan Sampurno Kolopaking sebagai Bupati Bekasi tahun 1951 dengan melihat konteks politik, mekanisme penunjukan, serta keterlibatan aktor pusat dan lokal. Penelitian ini juga mengarahkan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pusat dalam menempatkan pejabat daerah terkait dengan upaya konsolidasi kekuasaan pasca revolusi. Maka dari itu, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan pusat dan daerah dalam masa awal Republik Indonesia.

Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan kajian tentang dinamika politik-administratif Bekasi pada awal 1950-an, yang selama ini jarang

disentuh dalam historiografi lokal. Fokus pada figur Sampurno Kolopaking menawarkan perspektif baru mengenai peran birokrat dalam pembentukan pemerintahan daerah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pengangkatan Sampurno Kolopaking sebagai Bupati Bekasi tahun 1951, termasuk latar belakang politik, proses penunjukan, dan implikasinya terhadap hubungan pusat-daerah pada masa awal konsolidasi negara pasca-revolusi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi berjudul "*Sampurno Kolopaking: Dinamika Pengangkatan Bupati Bekasi Tahun 1951*", adalah metode sejarah (*historical method*) yang terdiri dari empat tahapan utama: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Madjid & Wahyudi, 2014). Data primer diperoleh dari arsip dan surat kabar berbahasa Belanda yang diakses melalui arsip digital Belanda serta dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, keputusan pengangkatan pejabat, dan pemberitaan kontemporer di *Delpher.nl*. Sumber sekunder meliputi buku sejarah Bekasi, penelitian mengenai politik lokal Indonesia, serta studi tentang konsolidasi kekuasaan negara pasca-revolusi.

Kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas arsip, terutama melalui perbandingan antara pemberitaan surat kabar, dokumen pemerintah, dan literatur lokal. Tahap ini penting untuk memastikan konsistensi informasi mengenai situasi politik Bekasi awal 1950-an dan identifikasi posisi Sampurno Kolopaking yang sebelumnya sebagai pejabat di Deli Serdang pada tahun 1947–1951 yang ditempatkan di Bekasi atas intruksi pusat. Tahap ini dilakukan untuk menentukan apakah sumber-sumber tersebut cukup valid atau tidak (Madjid, 2021).

Tahap interpretasi dilakukan dengan membaca dan menafsirkan sumber secara kontekstual. Pada tahap ini, penelitian menggunakan pendekatan sejarah politik, yaitu melihat proses pengangkatan Sampurno Kolopaking sebagai bagian dari hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan elite lokal, termasuk mekanisme penempatan pejabat dan konsolidasi otoritas negara pada masa pasca-revolusi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap faktor politik-administratif yang mempengaruhi keputusan pengangkatan bupati. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menjelaskan dan mengintegrasikan sumber-sumber yang telah dikumpulkan, dengan hasil akhir berupa kesimpulan (Madjid, 2021).

Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk historiografi naratif-analitis yang menggabungkan urutan kronologis dengan penjelasan mengenai dinamika politik dan administratif. Pendekatan ini memungkinkan penyajian proses pengangkatan Sampurno Kolopaking secara lebih utuh sekaligus menyoroti aspek-aspek yang belum banyak dibahas dalam historiografi Bekasi sebelumnya. Keberadaan Penulis sejarah adalah sejalan dengan urgensi sejarah itu sendiri. Jika sebelumnya pembahasan lebih berfokus pada sejarah sebagai rangkaian peristiwa, maka pada tahap selanjutnya perhatian tidak lagi diarahkan pada aspek subjektif peristiwa dan kurun waktunya. Fokus kajian bergeser pada bagaimana manusia pada periode tertentu membangun dan menuliskan sejarah mereka (Madjid, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Konstelasi Politik Indonesia Pasca Revolusi

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan kata-kata magis yang mampu menggerakkan seluruh bangsa untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kata-kata proklamasi yang dibacakan Soekarno memiliki makna strategis baik di pusat pemerintahan maupun di daerah. Meskipun proses pemindahan kekuasaan diharapkan berlangsung cepat, kenyataannya penuh pergolakan dan membutuhkan waktu relatif lama. Beberapa peristiwa, seperti pertempuran Kota Baru di Yogyakarta, penyerbuan Kenpeitai di Surakarta, dan konflik di beberapa kota lainnya, menunjukkan bahwa transisi kekuasaan terjadi dengan cara yang sangat berdarah (Nurdiyanto et al., 2013).

Selain itu, Suryani (2016) menegaskan bahwa dekade 1950-an bukanlah dekade kegagalan, karena sebagian besar wilayah Indonesia cukup stabil dan perbedaan pusat-daerah dapat ditengahi melalui mekanisme demokrasi parlementer. Pandangan ini sejalan dengan konsep *imagined communities* Benedict Anderson, yang menunjukkan bagaimana elite pribumi membayangkan persatuan bangsa meskipun jarang bertemu secara fisik.

Awal dekade 1950-an merupakan masa krusial dalam sejarah politik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, pemerintah pusat di Jakarta menghadapi berbagai tantangan dalam menata pemerintahan daerah. Salah satu isu penting adalah penempatan pejabat daerah, terutama bupati, yang kerap menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah, serta antara partai-partai politik besar, khususnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi. Namun, menurut (Noer, 1987) didalam buku *Partai Islam di Pentas Nasional* menjelaskan analisis perkembangan politik di Indonesia dari periode 1945 hingga 1965, terutama posisi partai Islam dalam lintas sejarah, termasuk partai Masyumi. Justru partai Islam di pentas nasional menyoroti dibalik sisi menarik pergolakan partai Islam dalam menentukan kepemimpinan dan ideologi, ketegangan hubungan antar partai dan elit partai, kedudukan dan peran tentara, hingga bangun dan jatuhnya kabinet.

Penunjukan bupati pada periode tersebut kadang kali tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat yang berusaha menjaga stabilitas nasional dengan elite lokal yang memiliki basis sosial dan politik kuat. Dalam praktiknya, proses pengangkatan bupati sering menjadi ajang kompromi maupun konflik antar aktor politik, baik yang berakar dari kekuatan lokal maupun dari partai-partai besar di tingkat nasional. Dua partai dominan, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi, kerap bersaing untuk menempatkan kader atau tokoh yang dianggap mewakili kepentingan mereka di daerah. Rivalitas keduanya mencerminkan polarisasi politik nasional pada masa demokrasi parlementer, di mana PNI lebih identik dengan nasionalisme sekuler, sedangkan Masyumi membawa aspirasi politik Islam yang kuat. Dengan demikian, pengangkatan bupati pada awal 1950-an tidak dapat dipandang semata sebagai urusan birokrasi, melainkan juga sebagai arena politik yang mencerminkan pertarungan ideologi dan kepentingan antara pusat, daerah, dan partai-partai besar.

Dalam konteks pengangkatan pejabat daerah pada awal 1950-an, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting. Ridwansyah (2017) mengutip Bagir Manan yang menjelaskan bahwa penentuan

luas atau sempitnya wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan daerah ditentukan oleh hubungan kekuasaan (*gezagsverhouding*) antara pusat dan daerah, termasuk kewenangan, keuangan, pengawasan, dan susunan organisasi pemerintahan di daerah. Bahwa kewenangan ini menjadi dasar sah setiap tindakan pemerintahan; tanpa dasar kewenangan yang jelas, tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dinamika tarik-menarik politik pusat dan daerah tersebut juga tercermin dalam kasus Bekasi pada awal 1950-an. Sumber-sumber primer dari surat kabar Belanda dan Hindia Belanda tahun 1950–1951 memberikan gambaran jelas tentang proses ini.

Ketegangan Politik di Deli Serdang 1951

Sebelum menjabat di Bekasi, selama masa jabatannya di Deli Serdang, Sampurno Kolopaking juga dikenal aktif dalam kegiatan publik. Dijelaskan dalam surat kabar Belanda, (*Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 1950) bahwa salah satu kegiatannya yaitu ketika ia dipercaya menjadi ketua umum panitia persiapan peringatan Hari Pahlawan (10–11 November), dengan sekretariat terdiri atas Elmud Tobing, Baharuddin Siregar, dan Kapten Zen Hamid. Panitia tersebut dibagi ke dalam tujuh seksi kehadiran Sampurno Kolopaking dalam acara ini menegaskan posisinya sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat sekaligus simbol kontinuitas perjuangan nasional di daerah.

Laporan surat kabar Belanda (*Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 1951a), melanjutkan informasi ditahun berikutnya untuk menggambarkan kondisi pada tanggal 25 Mei. Wan Umaruddin Barus resmi diangkat sebagai bupati (*regent*) Deli Serdang, setelah sebelumnya menjabat sebagai pejabat utama di bawah Gubernur Sumatra Utara. Ia menggantikan Sampurno Kolopaking, yang kemudian ditempatkan di kantor gubernur. Sementara itu, di Labuhanbatu juga terjadi pergantian jabatan, dengan Abdul Wahid Er. menggantikan Djamaluddin Tambunan sebagai bupati. Tiga hari kemudian, pada 28 Mei 1951, bupati baru Deli dan Serdang, Wan Umaruddin Baros, resmi menerima jabatannya. Dalam sebuah upacara singkat di kantor bupati di Medan (Sukamulia), ia mengambil alih jabatan dari Sampurno Kolopaking, yang dipindahkan ke kantor gubernur. Pada kesempatan serah terima jabatan ini berlangsung terjadinya sebuah kontroversi yang menimbulkan demonstrasi yang dipimpin oleh M. Pattipeluhu, ketua SEKATA (Serikat Kaum Tani), yang menyerahkan sebuah resolusi penolakan terhadap pengangkatan bupati baru. Penolakan ini mencerminkan masih kuatnya dukungan masyarakat, terutama petani terhadap Sampurno Kolopaking meskipun secara formal ia sudah tidak lagi menjabat.

Kontroversi itu semakin menarik ketika Sampurno Kolopaking menerima Pattipeluhu dan menjelaskan bahwa seorang pejabat pemerintahan wajib menjalankan perintah dari atasan. Ia menyatakan telah meminta bawahannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada bupati baru. “Secara pribadi,” kata Sampurno Kolopaking kepada *Mimbar Umum*:

“Saya merasa lebih aman di kantor gubernur karena di sana saya tidak perlu khawatir terhadap pemotongan gaji. Selain itu, saya sudah memiliki hak pensiun. Setiap pejabat harus bersedia dipindahkan, jika perlu sampai ke Celebes (Sulawesi)

atau Maluku. Jika ia tidak bersedia, maka ia tidak dapat lagi menjadi pejabat.” Ia mengatakan lagi:

“Saya sendiri siap ditempatkan di kantor gubernur apabila itu demi kepentingan bangsa dan negara. Dan jika saya ditempatkan tanpa tugas sekalipun, saya masih bisa meminta pensiun” (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951).

Namun, Pattipeluhu menanggapi dengan menekankan, bahwa ia sendiri tidak bermaksud menentang pribadi bupati baru, melainkan ia khawatir apabila Wan Umaruddin Baros menunjukkan sikap yang sama seperti ketika ia menjabat kepala wilayah di Lubuk Pakam waktu itu, para tani akan tetap “tertindas.” Menanggapi hal ini, Sampurno Kolopaking lalu menyerukan kepada Pattipeluhu untuk mempertimbangkan kembali permasalahan ini dengan sungguh-sungguh:

“Jika kita bisa mencapai kompromi dengan Jenderal Scholten, mengapa kita tidak bisa berdamai di antara kita sendiri? Kini sudah saatnya kita melupakan masa lalu. Kita harus menarik garis demokratis antara pertentangan-pertentangan lama kita. Jika kita bisa berdamai dengan orang Belanda, mengapa kita harus terus bertengkar di antara sesama kita sendiri?”

Seruannya itu agar “melupakan masa lalu” dan menarik garis demokratis atas pertentangan lama memperlihatkan posisinya sebagai mediator, bukan pengobar konflik (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951a).

Situasi semakin mereda setelah Munar S. Hamidjojo, kepala pegawai yang ditugaskan oleh gubernur, kemudian menjelaskan kepada pimpinan demonstrasi bahwa baik bupati lama maupun bupati baru hanya menjalankan perintah dari atasan. Karena itu, protes seharusnya ditujukan kepada gubernur atau wakil gubernur. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian datang dan meminta Pattipeluhu ikut ke kantor polisi. Di depan kantor bupati, pasukan Mobile Brigade telah berjaga untuk mencegah kemungkinan insiden. Meski pemimpinnya dibawa polisi, sekitar 400 pengunjung rasa tetap duduk dengan tenang, menunjukkan kedisiplinan gerakan mereka (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951a).

Seorang wartawan *Mimbar Umum* yang menanyakan beberapa demonstran mendapat kesan bahwa sebenarnya tidak seorang pun benar-benar tahu apa tujuan aksi tersebut. Mereka hanya menerima “perintah” untuk berkumpul dan diangkut dengan mobil menuju Medan. Ketika Pattipeluhu kembali dari kantor polisi, ia mengatakan bahwa pihak berwenang telah mendesak agar sebuah delegasi yang terdiri dari 5 atau 6 orang menghadap wakil gubernur. Hal itu pun dilakukan sebuah delegasi kecil pergi menemui Residen Teuku Daudsjah, sementara sisanya pulang ke rumah masing-masing. Maka dari itu kontroversi yang sempat menegang berakhir melalui mekanisme kompromi formal, tanpa menimbulkan eskalasi konflik lebih jauh (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951a).

Serangkaian peristiwa masih terus berlanjut sehingga selalu ada laporan dari (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951b). Di hadapan Teuku Daudsjah, Pattipeluhu menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan Wan Umaruddin Baros sebagai bupati Deli dan Serdang, karena jabatan itu seharusnya diisi oleh seorang “*republikein*” (tokoh republik). Pattipeluhu mula-mula menuntut jawaban dari gubernur dalam waktu satu minggu kemudian. Ketika ia mendapat informasi bahwa gubernur baru akan kembali ke Medan pada tanggal 31 Mei, Pattipeluhu menyatakan bersedia menunggu sampai 8 Juni. Akhirnya Residen Teuku Daudsjah

hanya menyatakan bahwa ia akan menyampaikan resolusi tersebut kepada gubernur.

Karena tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan yang memuaskan dari Residen Teuku Daudsjah, gelombang protes tidak mereda. Setelah sebelumnya hanya beberapa demonstran yang ikut, justru pagi tadi aksi kembali digelar dengan skala yang jauh lebih besar. Para demonstran kembali bergerak di Medan untuk memprotes pengangkatan Wan Umaruddin Baros sebagai bupati Deli dan Serdang. Jika pada hari Senin jumlahnya hanya beberapa ratus orang, kali ini ribuan tani ikut dalam arak-arakan yang mulai bergerak pukul setengah sebelas dari Esplanade menuju kantor gubernur. Para pengunjuk rasa kali ini berasal dari Serdang Hilir (Beneden-Serdang). Mereka berkumpul kemarin pagi di Lubuk Pakam dan menempuh jarak 29 km ke Medan dengan berjalan kaki, sebuah perjalanan yang memakan waktu sekitar delapan jam. Aksi ini diorganisir oleh Komite Aksi Tuntutan Rakyat Kewedanaan Serdang Hilir. Untuk menjaga ketertiban, sekitar lima puluh anggota Pandu Demokrasi Rakyat (*padvinders demokratis rakyat*) bertugas sebagai pengawal barisan dan membantu di mana diperlukan. Dalam perjalanan, pihak kepolisian berusaha membujuk agar demonstrasi dibubarkan dan hanya beberapa wakil yang berangkat ke Medan, tetapi usul ini ditolak oleh panitia aksi (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951b).

Setelah menempuh perjalanan panjang, para demonstran akhirnya tiba di Medan. Para tani berhenti di lapangan dekat Ajor Beresih di Jalan Radja sekitar pukul 16.30 sore. Kemudian arak-arakan bergerak lagi menuju Kampung Pasar Belakang di ujung Jalan Serdang, tempat mereka bermalam. Jumlah demonstran sulit diperkirakan, menurut Mimbar Umum sekitar 2.000 orang, sementara Rakyat dan Waspada memperkirakan sekitar 4.000 orang. Pagi ini barisan kembali dibentuk. Mula-mula mereka berjalan melalui jalan Serdang ke Esplanade (sekarang tempat itu dikenal sebagai Lapangan Medeka Medan) dan beristirahat sebentar di sana. Pukul 10.30, arak-arakan kembali bergerak melewati jalan Raden Saleh dan jalan Djokja menuju kantor gubernur. Spanduk-spanduk merah dengan berbagai slogan menentang Wan Umaruddin Baros dan mendukung Sampurno Kolopaking (bupati lama) dibawa serta bersama bendera merah putih (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951b).

Setibanya di sekitar kantor gubernur, suasana kota Medan semakin tegang. Di berbagai titik, polisi kota dikerahkan untuk mengawasi, sementara pasukan Mobile Brigade menghentikan lalu lintas. Para pengunjuk rasa tidak diizinkan masuk ke halaman kantor gubernur, yang dijaga ketat oleh polisi dan Mobile Brigade. Meskipun demikian, saat berita ini dicetak, pawai protes di kota masih terus berlangsung. Menurut informasi yang diterima, gubernur Sumatra Utara, Abdul Hakim, tadi malam telah kembali dari Tapanuli, tempat ia mengunjungi keluarganya. Ia telah menerima laporan mengenai aksi protes terhadap pengangkatan bupati-bupati baru. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, sikap resmi gubernur mengenai hal ini akan diumumkan (Het Nieuwsblad voor Sumatra, 1951c).

Kontroversi politik di Deli Serdang-Sumatera Utara yang melibatkan pengangkatan Wan Umaruddin Baros sekaligus memperlihatkan bagaimana posisi Sampurno Kolopaking masih kuat di mata masyarakat. Sosok Sampurno Kolopaking yang didukung demonstran ini memiliki rekam jejak panjang sebagai pejuang.

Menurut buku *Gerilya di Asahan, Labuhan Batu*, Sampurno Kolopaking selama masa perang kemerdekaan memang menjabat sebagai pejabat pemerintahan sekaligus ikut berjuang dalam gerilya bersama Jamin Ginting di wilayah Sumatera Timur (1948–1949). Ia juga menyandang pangkat mayor dengan jabatan sebagai Kepala Distrik Militer Sumatera Timur Selatan. Nama Sampurno Kolopaking dikenang warga Tanjung Balai Asahan sebagai pejuang kemerdekaan (Mansyur, 1977).

Dinamika Pengangkatan Sampurno Kolopaking di Bekasi 1951

Sampurno Kolopaking merupakan Bupati baru Bekasi ke-2 yang menjabat sejak 1 November 1951 hingga 30 Januari 1958, atau selama enam tahun 90 hari. Ia melanjutkan kepemimpinan dari Bupati pertama. Suhandan Umar, yang sebelumnya harus melepas jabatannya karena ditahan selama beberapa bulan.

Sebelum Sampurno Kolopaking berkiprah di wilayah Bekasi sebagai Bupati Bekasi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, Suhandan Umar dari Partai Masyumi menjabat sebagai Bupati Bekasi yang pertama, sekaligus Ketua Dewan Pemerintahan Daerah Sementara (DPDS) dengan enam anggota. Wewenang utama DPDS adalah menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pada 10 Oktober 1950 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) dengan 35 anggota, yang menunjuk Madnuin Hasibuan dari Masyumi sebagai ketua. Masa jabatan Suhandan Umar sebagai Bupati tidak berlangsung lama, karena DPRDS yang terbentuk tiga bulan setelah pelantikannya menjadi sumber konflik. Pertentangan antara Bupati dan DPRDS terus terjadi; Suhandan Umar menolak hadir dalam sidang-sidang DPRDS dan melarang pegawainya berhubungan dengan DPRDS maupun DPDS. Puncaknya terjadi pada 5 Mei 1951, ketika DPRDS Bekasi menjatuhkan mosi memecatnya dan meminta penggantinya dalam sidang di Jatinegara. Tidak lama kemudian, Suhandan Umar ditangkap oleh Komando Militer Kota Besar Jakarta Raya karena kedekatannya dengan organisasi terlarang “Bambu Runcing” (Kusnawan, 2016).

Sejak 13 September 1951, Bupati Bekasi, Raden Suhandan Umar, ditahan atas dugaan kepemilikan senjata ilegal, bersamaan dengan wedana yang berada di bawah wewengannya. Penahanan ini awalnya dilaporkan oleh beberapa surat kabar, termasuk (*Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode*, 1951; *De Nieuwsgier*, 1951a; *Nieuwe Courant*, 1951; Wray, 2024), namun pada saat itu kebenarannya belum sepenuhnya jelas. Konfirmasi resmi kemudian menyatakan bahwa Suhandan Umar dipindahkan ke Struyswijk, sedangkan wedana Sirad ditahan di kantor polisi Jatinegara. Kepemilikan senjata oleh keduanya tidak disertai surat izin sah, meskipun hubungan antara kedua kasus belum dapat dipastikan. Selama masa penahanan Suhandan Umar, pemerintahan Bekasi sementara dijalankan oleh patih setempat sebagai bupati sementara (*waarnemend bupati*). Kejadian ini sejalan dengan pergantian pejabat lain di Jawa Barat pada periode yang sama, di mana beberapa bupati ditempatkan pada posisi baru di pemerintahan provinsi atau nasional, menegaskan pola intervensi dan pergeseran kepemimpinan di tingkat daerah pasca-revolusi.

Setelah dibebaskan, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK No. 6/16/21 tertanggal 19 Oktober 1951 yang menyatakan berakhirnya masa bakti Suhandan Umar sebagai Bupati/DPDS, dan selanjutnya ia diperbantukan di Departemen Dalam Negeri (Kusnawan, 2016). Kekosongan jabatan Bupati Bekasi tersebut

membuka jalan bagi pengangkatan pengganti, yakni Sampurno Kolopaking, yang sebelumnya menjabat Bupati Deli Serdang. Penunjukan Kolopaking terjadi di tengah dinamika politik pasca-revolusi.

Meskipun Sampurno Kolopaking tidak berniat menjadi Bupati Bekasi, pemerintah pusat memiliki kehendak lain, yang membuatnya harus menerobos badai revolusi. Legitimasi tersebut bersifat kontekstual dan tidak serta-merta dapat ditransfer ke wilayah lain. Ketika pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dari PNI yang dipimpin oleh Iskaq Tjokroadisurjo yang menunjuknya sebagai Bupati Bekasi pada 1951, situasi politik menjadi jauh lebih kompleks. Di Bekasi, pengangkatan Kolopaking justru memicu penolakan dari Masyumi yang telah menyiapkan empat kandidat alternatif. Dengan demikian, perjalanan karier Sampurno Kolopaking mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan politik pusat-daerah, serta rivalitas antarpolisi nasional, yang mewarnai proses pengangkatan seorang bupati pada awal 1950-an.

Menurut surat kabar Belanda (De Nieuwsgier, 1951b) pada tanggal 26 November, bahwa setelah reputasinya dikenal luas sebagai pejuang kemerdekaan dan mantan bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Sampurno Kolopaking diangkat menjadi Bupati Bekasi, Jawa Barat. Pengangkatan bupati ini disambut dengan “rasa keberatan” oleh Dewan Pemerintahan Kabupaten (*Bestuurscollege van de kabupaten*) Bekasi, sebab mereka beberapa waktu lalu telah mengajukan empat calon kepada Kementerian Dalam Negeri untuk jabatan bupati Bekasi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Dewan Pemerintahan Bekasi yang kemarin melakukan kunjungan ke Dewan Pemerintahan Jawa Barat di Bandung.

Surat kabar Belanda (Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode, 1951) menegaskan, bahwa keempat calon itu seluruhnya adalah anggota Masyumi, yaitu Surowijono, Sitalaksana, Sardjono, dan Sasmitadinadja. Namun Menteri Dalam Negeri, yang berasal dari PNI, tampaknya tidak memperhatikan calon-calon yang diajukan dewan tersebut, dan justru mengangkat seorang tokoh PNI menjadi bupati.

“Fakta ini kami terima dengan rasa keberatan, tetapi mengingat posisi negara kita saat ini, menurut pendapat kami tidaklah bijak untuk melakukan aksi protes terhadap pengangkatan tersebut,”

Demikian pernyataan juru bicara Dewan Pemerintahan Bekasi. Peristiwa ini menyiratkan bahwa pada awal 1950-an, mekanisme pemilihan kepala daerah masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik pusat, di mana PNI berhasil mengamankan posisi strategis meskipun berseberangan dengan aspirasi politik lokal yang didominasi Masyumi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Kusnawan, 2016, pp. 422–423), bahwa pada tanggal 1 November 1951, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK No. Up-6/16/ tentang pengangkatan Sampurno Kolopaking dari Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai Bupati Bekasi. Kolopaking dilantik pada 19 November 1951 di Kantor Bupati Bekasi yang terletak di daerah Jatinegara. Pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Jakarta Raya, kepala-kepala jawatan (dinas) keresidenan dan kabupaten, DPD, serta DPRDS. Kolopaking menjabat sampai 30 Januari 1958, menandai periode penting dalam konsolidasi pemerintahan lokal pasca-revolusi. Hal yang terjadi di Bekasi dari keputusan pusat ini menimbulkan ketegangan politik lokal.

Fenomena serupa juga terlihat pada pengangkatan gubernur Jawa Barat, Mohammad Sanusi Hardjadinata pada tahun 1951, yang menegaskan pola intervensi politik PNI terhadap penunjukan pejabat daerah dan provinsi, sementara Masyumi hanya mengambil sikap nonaktif. Sebelumnya Dewan Pemerintahan Jawa Barat juga pernah mengajukan empat calon untuk jabatan gubernur, yang semuanya berasal dari Masyumi. Namun, Menteri Dalam Negeri justru mengangkat Sanusi Hardjadinata dari PNI. Sebagai bentuk protes waktu itu, anggota Masyumi di Dewan Provinsi mengambil sikap nonaktif (*Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode*, 1951).

Mohammad Sanusi Hardjadinata lahir pada tanggal 24 Juni 1914 dan wafat 12 Desember 1995. Sanusi mengawali karir politik sebagai ketua PNI Cabang Garut (1947), menjadi wakil Residen Priangan (1947-1948), Residen Madiun (1948-1949), dan Gubernur Jawa Barat (1951-1957). Pada Kabinet Karya, Sanusi diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (1957-1959) dan pada Kabinet Ampera II menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1967-1968) (Arsipnasionalri, 2022).

Itulah sebabnya, baik pada kasus di Bekasi maupun Jawa Barat, tampak pola serupa dalam pengangkatan pejabat daerah pada awal 1950-an, yakni dominasi PNI melalui intervensi pusat. Pengangkatan Kolopaking ini sekaligus menunjukkan dinamika politik lokal di masa awal Republik, di mana pengaruh partai politik pusat dan reputasi individu memainkan peran penting, meskipun seringkali menimbulkan ketegangan terselubung antara partai-partai yang berbeda.

Situasi ini memperlihatkan posisi politik PNI yang pada masa itu menjadi partai terbesar. Kekuatan utamanya bertumpu pada kalangan birokrasi dan pegawai negeri. Di pedesaan Jawa, PNI memperoleh dukungan luas terutama dari masyarakat muslim abangan. Walaupun secara resmi Soekarno tidak pernah tercatat sebagai anggota ataupun pemimpin partai, sebagian masyarakat tetap mengidentikkan PNI sebagai partainya. Dukungan bagi PNI juga cukup kuat di wilayah-wilayah Kristen di luar Jawa serta di Bali yang mayoritas beragama Hindu, di mana terdapat sentimen anti-Islam yang turut memperkuat basis partai tersebut (Ricklefs, 2008, p. 480).

Kasus pengangkatan Sampurno Kolopaking sebagai Bupati Bekasi pada 1951 tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik nasional pada awal 1950-an. Sejak 1950, Indonesia menganut sistem parlementer multi-partai ala Belanda. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dengan satu kamar beranggotakan 232 orang, di mana Masyumi memperoleh 49 kursi (21%), PNI 36 kursi (16%), PSI 17 kursi (7,3%), PKI 13 kursi (5,6%), Partai Katolik 9 kursi (3,9%), Partai Kristen 5 kursi (2,2%), dan Murba 4 kursi (1,7%). Lebih dari 42 persen kursi sisanya tersebar di antara partai-partai kecil maupun individu, sehingga tidak ada partai yang mampu membentuk pemerintahan yang kuat. Presiden Sukarno pun hanya memiliki kekuasaan terbatas, sekadar menunjuk formatur kabinet baru, yang selalu diwarnai kompromi politik. Dalam situasi seperti itu, PNI sebagai salah satu partai terbesar berupaya memperluas pengaruhnya melalui birokrasi, termasuk dengan menempatkan kader atau simpatisannya di daerah. Maka, meskipun Dewan Pemerintahan Kabupaten Bekasi mengusulkan empat calon bupati dari Masyumi, Menteri Dalam Negeri tetap mengangkat Kolopaking dari PNI. Hal ini menunjukkan bagaimana dinamika politik nasional tercermin dalam tarik-menarik kekuasaan di tingkat lokal (Ricklefs, 2008).

Salah satu aspek penting yang perlu digarisbawahi dalam kasus pengangkatan Sampurno Kolopaking adalah adanya pola yang serupa dengan daerah lain pada awal 1950-an. Di Jawa Barat, misalnya, penunjukan pejabat daerah sering kali ditentukan oleh kombinasi antara pertimbangan teknokratis dari Kementerian Dalam Negeri dan tekanan partai politik nasional. Fenomena ini, di mana PNI berusaha memperkuat basis dukungan politiknya, sementara Masyumi berupaya mempertahankan pengaruhnya di kalangan masyarakat muslim perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian, pengangkatan Kolopaking bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola umum konsolidasi negara pasca-revolusi. Analisis komparatif ini memperlihatkan bahwa Bekasi merupakan contoh konkret dari bagaimana intervensi pusat berjalan beriringan dengan rivalitas partai politik, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak elite lokal dalam menentukan kepemimpinan daerahnya.

Meskipun sejarah tidak selalu menjelaskan peristiwa secara detail, pencatatan dan analisis terhadap pengalaman masa lalu tetap menjadi sumber pembelajaran yang berharga. Memahami perjalanan karier Sampurno Kolopaking, termasuk tantangan politik dan dinamika lokal yang ia hadapi, memungkinkan kita menilai bagaimana keputusan pemerintah pusat memengaruhi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menurut (Fajar, 2023), pemerintah Kabupaten Bekasi mengabadikan tokoh-tokoh Bupati yang telah wafat melalui penamaan gedung organisasi perangkat daerah di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun 2023, antara lain: Gedung Inspektorat Blok A2 dinamai R. Suhandan Umar (Bupati 1949–1951), Kantor Bappeda Blok A3 menjadi Gedung Sampurno Kolopaking (Bupati 1951–1958), Kantor Dinas Lingkungan Hidup Blok E11 menjadi Gedung Abdul Fatah (Bupati 1973–1983), Kantor Dinas Kesehatan Blok E12 menjadi Gedung M. Sukat Soebandi (Bupati 1967–1973), Kantor Dinas Ketenagakerjaan Blok E14 dinamai Dr. H. Sa'aduddin (Bupati 2007–2012), Kantor Cipta Karya dan Tata Ruang Blok E15 menjadi Gedung Maun Al Ismaun (Bupati 1960–1967), Kantor DPMPTSP Blok B5.1 menjadi Gedung M. Nausan (Bupati 1958–1967), Kantor Disdukcapil Blok B5.1.2 disematkan nama H. Eka Supria Atmaja (Bupati 2019–2021), Kantor Dinas Sosial Blok B5.1.5 menjadi Gedung H. Suko Martono (Bupati 1983–1993), dan Kantor Bapenda Blok B5.1.4 dinamai R.M.K.S. Prawira Adiningrat (Bupati 1958–1967).

Nama Sampurno Kolopaking memang telah diabadikan melalui penamaan gedung di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun di sisi lain, narasi sejarah mengenai perjalanan hidupnya dalam proses menjadi Bupati Bekasi belum banyak dibahas secara rinci. Dengan mengangkat aspek yang dibahas, artikel ini memberikan sumbangsih wawasan yang bermanfaat bagi khalayak luas, khususnya warga pribumi Bekasi, serta memperkaya pemahaman mengenai dinamika politik lokal pada masa awal konsolidasi negara.

Kesimpulan

Perjalanan politik Sampurno Kolopaking dari Deli Serdang ke Bekasi pada 1951 memperlihatkan keterkaitan erat antara dinamika politik lokal dan pusat dalam sejarah Indonesia pasca-revolusi. Ia tampil sebagai figur populer di mata rakyat, terutama petani Deli Serdang yang menolak penggantian dirinya, sekaligus menunjukkan loyalitas kepada pemerintah pusat dengan menerima keputusan

politik yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi lokal. Pengangkatannya menegaskan dominasi politik pusat, khususnya PNI, atas daerah-daerah strategis, sementara Masyumi, meskipun memiliki basis kuat di Jawa Barat, gagal memengaruhi pengisian jabatan bupati meski dewan kabupaten telah mengajukan calon sendiri. Proses ini mencerminkan arena politik yang menjadi medan pertarungan ideologi dan kepentingan antara pemerintah pusat, elite lokal, dan partai-partai besar, di mana penunjukan pejabat lokal digunakan sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan nasional sekaligus medan negosiasi dan konflik politik lokal. Pengangkatan Kolopaking bukan sekadar peristiwa birokrasi, tetapi bagian dari strategi elite politik pusat dalam mengamankan kepentingan melalui birokrasi lokal, sehingga ia menjadi saksi sekaligus aktor penting dari fase kritis konsolidasi politik Indonesia pasca-revolusi.

Penelitian ini menekankan pentingnya figur Kolopaking sebagai aktor administratif untuk memahami sejarah politik lokal, sekaligus memperluas historiografi Indonesia yang selama ini lebih banyak menekankan aspek militer dan perjuangan rakyat. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana interaksi pusat-daerah dan pertarungan kepentingan partai membentuk jalannya politik lokal, memberikan perspektif baru mengenai proses pembentukan negara Indonesia pada awal 1950-an, serta menegaskan bahwa politik lokal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kebijakan pusat maupun dinamika elite partai di tingkat daerah. Dengan demikian, kasus pengangkatan Kolopaking menyoroti bahwa konsolidasi politik Indonesia pasca-revolusi terjadi tidak hanya melalui perundingan dan keputusan di Jakarta, tetapi juga melalui tarik-menarik kepentingan lokal dan nasional yang mewarnai pengisian jabatan strategis di daerah.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Johan Wahyudi, M.Hum., yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan artikel ini. Di tengah kesibukan akademiknya di Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau tetap memberikan arahan dan masukan yang berharga dalam penyempurnaan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode. (1951, October 18). Mutates In West Java. *Preangerbode*.
- Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode. (1951). *De Geschiedenis Herhaalt Zich Candidaten Masjumibij een Bestuursfunctie Genegeerd*. Preangerbode.
- Arsipnasionalri. (2022). *Sanusi Hardjaniata bersama Rektor UGM Prof. Dr. Sardjito dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam VIII*. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CisFU55Pejt/?igsh=MXdraWp2bjBmZTRieg=>. Diakses tanggal 1 September 2025.
- BPK RI. (1950). *Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat*. Database BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/59691/uu-no-14-tahun-1950>. Diakses tanggal 1 September 2025.

- Cribb, R. (2009). *Gangster And Revolution: The Jakarta People's and The Indonesian Revolutions 1945-1949*. Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd.
- De Nieuwsgier. (1951a). *Bupati, Wedana in Arrest Wegens Onwettig Wapenbezit*. De Nieuwsgier
- De Nieuwsgier. (1951b). *Nieuwe Boepati van Bekasi*. De Nieuwsgier
- Dwiyanto, A. (2022). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia*. UGM Press.
- Fajar. (2023). *Pemkab Bekasi Abadikan Nama Mending Bupati Bekasi untuk Gedung Perangkat Daerah*. Portal Resmi Kabupaten Bekasi. <https://bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-abadikan-nama-mending-bupati-bekasi-untuk-gedung-perangkat-daerah>. Diakses tanggal 1 September 2025.
- Het Nieuwsblad voor Sumatra. (1950). Viering van Heldendag. *Deli Courant En De Sumatra Post*.
- Het Nieuwsblad voor Sumatra. (1951a). Nieuwe Bupati's. *Deli Courant En De Sumatra Post*.
- Het Nieuwsblad voor Sumatra. (1951b). Oude controverse moet eens vergeten worden. *Deli Courant En De Sumatra Post*.
- Het Nieuwsblad voor Sumatra. (1951c). Actie tegen nieuwe bupati duurt voort. *Deli Courant En De Sumatra Post*.
- Kusnawan, E. (2016). *Sejarah Bekasi: Sejak Peradaban Buni ampe Wayah Gini*. Herya Media.
- Madjid, M. D. (2021). *Metode Sejarah: Teori dan Praktik*. Kencana.
- Madjid, M. D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Kencana.
- Maksum, B., Hartawan, D., Hamidullah, D., Almu'tamiroh, H., Hakiem, L., Mursjid, M. A., Kamal, M., (2017). *Ulama Pejuang Kabupaten Bekasi: KH. Noer Ali (Pahlawan Nasional)*. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi.
- Mansyur, (1977). *Geriliya di Asahan-Labuhan Batu 1947-1949*. Kodam Bukit Tinggi.
- Nieuwe Courant. (1951). Personalial Allied Military Administration Civil Affairs Branch (AMACAB).
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Grafitipers.
- Nurdiyanto, Harnoko, D., & Tri Wahyono, T. (2013). *Sejarah Revolusi di Tingkat Lokal*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNP).
- Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi. (1992). *Sejarah Bekasi: Sejak Pemerintahan Purnawarman sampai Orde Baru*. Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi bekerjasama dengan Yayasan Historia Vitae Magistra (Yavitra).
- Priyadi, S. (2012). *Sejarah Lokal: Konsep, Metode dan Tantangannya*. Penerbit Ombak.

- Suryani, D. (2012). Melihat Relasi Daerah dan Negara Tahun 1950-an Dengan Membongkar Narasi Besar Sejarah. *Journal of Political Research*, 9(2), 119-126. <https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/11201>.
- Reid, A. (1974). *Indonesian National Revolution 1945-50*. Longman Australia Pty Limited. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971712334711883031>.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 19(1), 127-158. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2018>.
- Wray, J. (2024). *From the Colony to the Republic: Controlling Cross-Border Movement in Revolutionary Indonesia, 1945-1949*. Disertasi. The Australian National University Australia.